

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011)
- Adrian Sutendi. *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cet. Ke-2*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)
- Andi Hamzah, Mohammad Taufik Makarao, dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia, 2004)
- Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti. 2010).
- , Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011)
- Barda Nawawi, Arif. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. (Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 1994).
- Barda Nawawi, Arif. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Semarang, Undip 1996)
- C.S.T. Kasnsil dkk, *Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nasional*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009)
- Deni Setyawati, *KPK Pemburu Koruptor Kiprahlm. Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Memberangus Korupsi*, (Yogyakarta : Pustaka Timur, 2008)
- Dharmawan, dkk, *Jihad Melawan Korupsi*, (Jakarta, Penerbit Buku Kompas, cet-ke 1, 2005)
- Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, (Jakarta, Raja Grafindo Perkasa, 2005)
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Cet. Ke-2*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)

- Fuady Munir, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, (Bandung: PT. Refika Aditama. 2011)
- Handoyo, Eko. *Pendidikan anti Korupsi*. (Semarang: Penerbit Ombak (Anggota IKAPI). 2013)
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Laporan Tahunan KPK Menyalakan Lilin di Tengahlm. Kegelapan*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2007)
- Krisnawati, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, (Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2006)
- Laden Marapaung, *Asas Teori Prakek Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- M. Marwan & Jimmy P., *Kamus Hukum*, (Yogyakarta: Gama Press, 2009)
- Mansyur Semma, *Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008)
- Mukti Fajar ND. dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, (Bandung: PT. RefikaAditama, 2011)
- Poerwardaminta, WJS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Bahasa, 1986)
- Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi, cet.V*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010)
- Pustaka Yustisia, *Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik, Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Jogjakarta : Pustaka Yustisia, 2009)
- R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar lengkap pasal demi pasal*, (Politeia, Bogor, 1991)
- Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2012)
- Saldi Isra, *Kekuasaan dan Perilaku Korupsi*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009)

Satjipto Raharjo, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, (Jakarta: Buku Kompas, 1993)

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007)

-----, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali, 1982)

-----, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press, 1986)

Surachmin, Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui untuk Mencegahm*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2011)

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi, Cet. Ke-3*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana, Cet. Ke-4*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)

Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, (Bandar Lampung:Universitas Lampung, 2011)

Umar Said, *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah dan Dasar-dasar Tata Hukum Serta Politik Hukum Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2009)

Yusril Ihza Mahendra, *Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia, cet.I*, (Jakarta, Tim Pakar Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Bersama Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, 2002)

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum, Cet. Ke-2*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

## **Undang-Undang**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang- UndangHukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Convention Against Corruption, 2003. (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)

Putusan Pengadilan Tipikor Nomor: 85/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT. PST dengan terdakwa Rudi Rubiandini

Putusan Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung 169/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel dengan Terdakwa Atty Suhart

### **Makalah/Jurnal/**

Hikmahanto Juwana, *Aspek Penting Pembentukan Hukum Teknologi Informasi Indonesia*, (Jakarta, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 16, November 2001)

Ridwan Khairandy., *Pembaharuan Hukum Kontrak Sebagai Antisipasi Transaksi Electronic Commerce*, (Jakarta, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 16 November 2001).

Zulkarnaen Sitompul., *Pengaruhlm. Perkembangan Telematika Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta: Artikel versi PDF, Oktober 2003)

### **Internet**

(Lagi) *OTT = Tertangkap Tangan; Tanggapan Balik Prof. Eddy Hiariej untuk Prof. Romli Atmasasmita*, di unduh dari <http://www.negarahukum.com/hukum/eddy-hiariej-dan-romli-atmasasmita.html> tanggal 11 Januari 2018

17 *Operasi Tangkap Tangan KPK Terheboh*, di unduh dari <http://www.hukumonline.com> tanggal 20 November 2017

*Analogi, OTT, dan Fungsi KPK*, di unduh dari <https://nasional.sindonews.com> tanggal 11 November 2018

*Eddy Os Hiariej: Memaknai Tertangkap Tangan*, di unduh dari <http://www.negarahukum.com/hukum/eddy-os-hiariej.html> tanggal 10 Januari 2017

*Empat Isu Penting Merespons Pandangan Prof Eddy OS Hiariej*, di unduh dari <http://www.negarahukum.com/hukum/romli-atmasasmita.html> tanggal 11 Januari 2018

*Kerugian negara akibat korupsi* di unduh dari <http://www.antikorupsi.org> tanggal 20 Oktober 2017

*Kebijakan Pemberantasan Korupsi* di unduh dari <https://belajarbersamahannin.wordpress.com> tanggal 17 November 2017

*Ketua DPD Irman Gusman ditetapkan sebagai tersangka setelah operasi tangkap tangan KPK* di unduh dari <http://www.bbc.com> 20 Oktober 2017

*KPK Fungsi dan Tugas* di unduh dari <http://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/fungsi-dan-tugas>, tanggal 23 November 2017

OTT yang Menakutkan, di unduhlm. dari <http://www.beritasatu.com> tanggal 20 November 2017

*OTT = Tertangkap Tangan, Ini Komentar Prof Romli untuk Prof Eddy Hiariej*, di unduh dari <http://www.negarahukum.com/hukum/romliatmasasmita.html> tanggal 10 Januari 2018

*OTT KPK Ilegal: Ini Tanggapan Balik Prof. Romli untuk Prof. Eddy Hiariej*, di unduh dari <http://www.negarahukum.com/hukum/romli-atmasasmita-dan-eddy-hiariej.html> tanggal 11 Januari 2018

Operasi Tangkap Tangan Oleh KPK di unduh dari <http://docplayer.info> tanggal 20 Oktober 2017

Sekilas KPK, di unduh dari <http://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-kpk> tanggal 20 Oktober 2017

Tiur Henny Monica, Penjebakan pada Operasi Tertangkap Tangan KPK: Proses Hukum atau Tindakan Melawan Hukum di unduh dari <http://www.hukumonline.com> tanggal 19 Oktober 2017

Upaya Penal dan Non Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di unduh dari <http://hasniaabni.blogspot.co.id> tanggal 19 Oktober 2016